

STUDI PENDAHULUAN PERANCANGAN SISTEM PEMANTAU INDIKATOR KINERJA KEPALA DAERAH KABUPATEN DAN KOTA

Ai Rosita

Jl. Cikutra No.204A Bandung Jurusan Teknik Informatika Universitas Widyatama
Email: ai.rosita@widyatama.ac.id

ABSTRACT

There are several drawbacks carried out by the regional government currently, such as 1) each District head that has been elected never republication programs have been offered when the campaign. 2) Each district head in determine strategic planning toward all program never publish transparently to the public about key performance indicator that has been reached, 3) without tools for to perform mapping variable toward all KPI's variables that programmed government, 4) Regional Development Information System are integrated systems that has been implemented only give the information of tabulation of final result in one district, and it can't showing performance head district as precision, Objective of this Research is design a Indicator public monitoring system for monitoring district head performance in district or city that can interaction between government and public obtained get indicator about actual condition of governance in district

The planning of activity are program that has been planned by head of district should be done key performance Indicator, wherever in each process there are goal key parameter (KPI) showing capabilities and capability skill of head district in the wheels of government, KPI target and realization. KPI Achievement target and its realization in a certain period of time can be monitored as real time in a portal or networking .The performance Indicator public monitoring systems for Head of Regions

Target achievement of KPI and its realization in a certain period of time can be monitored in real time in a portal and social networking media. Public Monitoring System Performance Indicators Regional Head receive feedback in the form of qualitative parameters KPI planned a regional leader, then the data will be parsed by the data input from the public through social networks or via telecommunication media such as mobile phones. Each KPI parameters are made to be split into smaller variables and these variables will correspond to the input parameters input by the general public through social

media or telecommunications equipment. Public data entered will be validated by the system to provide a key broadcaster for each input. Every public involved entering data performance assessment head of the region must first be registered to keep the personal data entered data is guaranteed truth and identified who the person providing such assessments.

Keywords :

Regional leader, Key Performance Indicators, Social Networking, Mobile Phone, Monitoring System

1. Pendahuluan

Seorang kepala daerah sesuai Peraturan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memiliki fungsi untuk menjalankan roda pemerintahan yang mencakup azas desentralisasi, artinya kepala daerah merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat untuk mengatur seluruh jalannya roda pemerintahan secara baik dan mandiri (otonom) maupun masih melalui mekanisme bantuan pemerintah pusat berupa bantuan dana APBN. Dalam menjalankan roda pemerintahan tersebut, setiap kepala daerah akan membuat rancangan jangka panjang dan jangka pendek yang disesuaikan dengan urgensi kebutuhan. Program-program yang tertuang dalam rencana kerja akan dibuatkan target pencapaian yang harus tercapai. Kinerja (*performance*) seorang kepala daerah sangat ditentukan dari target pencapaian program kerja yang terealisasi di daerahnya. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, atau kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi yang tertuang dalam perencanaan strategi suatu organisasi. Perencanaan Strategi yang dibuat oleh seorang kepala daerah biasanya diturunkan dari berbagai program yang ditawarkan kepada publik melalui pada saat kampanye sebelum seorang kepala daerah terpilih. Ketika seorang kepala daerah terpilih harus segera membuat

sebuah rencana kerja yang tertuang dalam *strategic planning* organisasi pemerintahan daerah. Kinerja atau sering disebut prestasi atau tingkat keberhasilan seseorang atau kelompok. Kinerja seorang kepala daerah dan jajarannya bisa diketahui hanya jika kepala daerah tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kriteria keberhasilan ini dapat berupa berbagai program pembangunan diberbagai bidang yang hendak dicapainya. Tanpa adanya tujuan dan target yang harus dicapai kinerja seorang kepala daerah tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.

2. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (5) menyebutkan bahwa: “Pemerintah daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat”.

Definisi Pemerintahan Daerah di dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2, adalah sebagai berikut: “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Berdasarkan definisi tersebut, yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan otonomi daerah secara bersama-sama antara pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menganut azas desentralisasi dimana unsur penyelenggara pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Dalam menjalankan roda pemerintahan seorang kepala daerah harus mengacu kepada asas pokok pemerintahan yang tertuang dalam Undang-Undang, diantaranya asas sentralisasi yaitu, sistem pemerintahan terpusat dimana kendali sepenuhnya ada di pemerintah pusat, dan asas desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri

Praktek pelaksanaan program kerja pemerintah harus direalisasikan dalam *strategy planning*, dimana akan ditentukan kriteria keberhasilan roda pemerintahan dengan cara merencanakan dan membuat *key performance Indikator* pemerintahan. Proses Perencanaan Strategi dengan realisasi pelaksanaan roda pemerintahan seringkali pada prakteknya mengalami berbagai kendala di lapangan sehingga banyak sekali program yang tidak terealisasi dan berujung pada penumpukan permasalahan. Disamping itu

berbagai program yang telah di canangkan pemerintah daerah sukar sekali dimonitor masyarakat karena tidak memiliki panduan atau patokan tingkat keberhasilan kinerja pemerintah. Target kinerja pemerintah hanya merupakan konsumsi kepala daerah beserta jajarannya dan tidak pernah sampai ke publik. Akibatnya banyak program pemerintah yang dikerjakan tidak sesuai dengan harapan masyarakat akibat hilangnya kontrol publik. Hal yang lebih jauh masyarakat tidak tahu informasi tentang bagaimana kinerja kepala daerah dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala pemerintahan daerah. Disamping itu, Penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang harus diimplementasikan sesuai Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2014 hanya mencantumkan informasi tabulasi data tentang resume data aktual yang ada di suatu propinsi atau kabupaten-kota. Sistem Informasi Pembangunan daerah diterapkan untuk memperlihatkan informasi aktual tentang kondisi daerah tertentu tanpa memperlihatkan suatu target pembangunan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Sehingga dalam sistem informasi pembangunan daerah tidak sepenuhnya terlihat prestasi yang ditunjukkan oleh seorang kepala daerah dalam memimpin wilayahnya.

3. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas dapat disimpulkan beberapa hal terkait berbagai kelemahan kontrol pemerintahan daerah yang ada saat ini yaitu:

1. Setiap kepala daerah terpilih tidak pernah mempublikasikan kembali program kerja yang telah ditawarkan ketika pada saat kampanye dilakukan, sehingga masyarakat tidak tahu persis program yang ditawarkan sudah dilaksanakan atau belum
2. Rata-rata kepala daerah dalam menentukan *strategic planning* terhadap seluruh program tidak pernah dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat mengenai *Key Performance Indicator* setiap program, target pencapaian ataupun laporan prestasi yang telah dicapai dari setiap program yang dicanangkan, konsumsi tersebut hanya terbatas pada pertanggung jawaban dihadapan anggota dewan.
3. Tidak adanya perangkat untuk melakukan *mapping variable* terhadap seluruh variabel KPI yang dicanangkan pemerintah sehingga dapat dilakukan pengolahan informasi yang menghasilkan *Achievement* untuk setiap KPI yang dicanangkan pemerintah sehingga tergambar jelas rencana KPI dan realisasi pencapaiannya.
4. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang merupakan sistem terintegrasi dan sudah diimplementasikan hanya memberikan informasi tabulasi hasil akhir data aktual yang ada di suatu

daerah, tidak memberikan informasi target yang harus dicapai daerah serta prosentase yang sudah terealisasi, sehingga di dalam sistem tersebut tidak bisa memperlihatkan kinerja kepala daerah secara presisi.

4. Tujuan Penelitian

Berbagai kendala yang dimiliki pemerintah daerah dalam menjalankan setiap programnya, merupakan masalah yang secara transparan harus diberitahukan kepada publik. Publik berhak dilibatkan dalam menilai setiap program yang telah dibuat pemerintah karena rakyat sendiri yang bisa menilai dan merasakannya. Dalam penelitian ini terdapat beberapa tujuan khusus penelitian, yaitu :

1. Mendefinisikan *strategic planning* program kerja kepala daerah kedalam bentuk proses bisnis yang diimplemetasikan dalam bentuk *Turtle Diagram* dimulai dari program input, proses, analisa SWOT, target KPI, serta proses outputnya
2. Terbangunnya *Framework* Manajemen Sistem Pemantau Publik beserta rancangan keterhubungan antar proses bisnis beserta aliran informasinya
3. Menguji setiap *framework* yang telah dikembangkan sehingga terjamin bahwa setiap detail proses dapat dikembangkan sebagai platform aplikasi sistem pemantau indikator kinerja kepala daerah kabupaten-kota
4. Terbangunnya sistem pemantau indikator kinerja kepala daerah kabupaten-kota sebagai sistem prototipe yang dapat diujicoba untuk memasukan data lengkap program kerja kepala daerah berupa:
 - a) Program kerja
 - b) Faktor sukses kritis (*Critical succes factor*)
 - c) Proses Input
 - d) *Interface* masukan
 - e) Variabel Aktivitas utama
 - f) Variabel Analisa SWOT
 - g) *Key Performanc Indicator*
 - h) Sasaran (*Objective*)
 - i) *Interface Output*
 - j) Proses output,

dan selanjutnya memasukan variable data yang dimasukan melalui fasilitas handphone atau alat komunikasi sebagai data *mapping* yang secara simulasi sebagai data input publik yang akan digunakan sebagai data pembanding dari variabel data input sebelumnya.

5. Urgensi Penelitian

Penerapan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang dimaksudkan untuk membangun sebuah sistem informasi yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kerja pemerintah daerah. Belum menjadikan sebuah sistem informasi yang interaktif antara pemerintah sebagai penyedia informasi dengan masyarakat sebagai pengguna sekaligus pemantau jalannya roda pemerintahan. Yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah bukan hanya sekedar informasi status pembangunan yang sedang berjalan, tetapi bagaimana masyarakat turut andil dalam memberikan data aktual mengenai pelayanan publik yang langsung dirasakannya seperti:

- a) Pelayanan kesehatan,
- b) Lapangan Kerja,
- c) Pelayanan Pendidikan,
- d) Pelayanan Administrasi Kependudukan dan perijinan,
- e) Pelayanan pengembangan Industri Kecil Menengah, dan lain-lain

Berbagai pelayanan yang dirasakan masyarakat dapat disalurkan melalui survey angket data yang dimasukan melalui perangkat telekomunikasi hand phone. Perangkat inilah yang nantinya akan menjadi interpreter untuk mengirimkan data kepada sistem yang dijadikan parameter penilaian kinerja kepala daerah. Sistem interaktif yang terhubung antara kepala pemerintah daerah sebagai pembuat *strategic plan* dan masyarakat pengguna dari kebijakan pemerintah sangat dibutuhkan saat ini sebagai barometer untuk mengontrol tingkat keberhasilan pemerintah daerah. Masyarakat sebagai pengguna jasa memiliki penilaian objectif tentang apa yang dirasakan di wilayahnya. Sistem Informasi Pembangunan Daerah masih memiliki kelemahan yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Informasi yang disampaikan hanya berupa tabulasi kondisi terkini keadaan daerah, tetapi tidak memuat target dan menampilkan *strategic plan* dari kepala daerah, *Key performance Indikator* dari setiap entitas pekerjaan daerah, prosentase pencapaian yang baru diperoleh serat informasi kendala apa saja yang dihadapi pemerintah.
- b) Sistem Informasi Pemerintah Daerah masih bersifat satu arah, artinya masyarakat belum bisa berinteraksi dengan sistem tersebut untuk memberikan penilaian kinerja pemerintah sehingga diperoleh data faktual tentang kondisi objectif figur pemimpin kepala daerah.

Dengan dirancangnya sebuah sistem pemantau public indikator kinerja kepala daerah kabupaten-kota yang dapat berinteraksi antara pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat diperoleh informasi akurat mengenai kondisi yang sebenarnya tentang tata kelola pemerintahan di daerah.

6. Studi Pustaka

Fungsi pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Menurut Undang Undang No.32 Tahun 2004 fungsi pemerintahan daerah adalah sebagai berikut :

- a) Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- b) Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan pusat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
- c) Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

Disamping fungsi di atas, dalam menjalankan roda pemerintahannya seorang kepala daerah harus mengacu kepada asas berikut [1]:

- a. Asas sentralisasi, yaitu sistem pemerintahan dimana segala kekuasaan dilakukan kendali pemerintah pusat.
- b. Asas desentralisasi, adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan rumah tangganya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. Asas dekonsentrasi, adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah kepada instansi vertikal wilayah tertentu.
- d. Asas tugas pembantuan, adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah atau desa; dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota atau desa; serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk tugas tertentu.

Secara hierarki penugasan pemerintahan dari pusat kepada pemerintah daerah memiliki jenjang struktural yang transparan ditunjang oleh peraturan dan perundang-undangan yang ada. Namun demikian pada tahapan proses pelaksanaan belum ada sebuah aturan baku mengenai keseragaman setiap kepala daerah untuk membuat *strategic plan* yang diatur secara baku di dalam sebuah peraturan pemerintah ataupun undang-undang.

Pembangunan nasional pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia menuju masyarakat yang makmur dan berkeadilan. Kebijakan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan pemerintah daerah di segala bidang terus diupayakan dan dimaksimalkan dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional dan otonomi daerah. Langkah tersebut dilandasi oleh pemikiran bahwa dalam sistem negara kesatuan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah satu kesatuan, walaupun tugas dan peranannya berbeda[2]. Pendekatan pembangunan sentralistik yang dilakukan selama ini, pada kenyataannya telah banyak menciptakan ketimpangan antara yang kaya dan miskin, ketimpangan antar daerah (regional) dan ketimpangan antara desa dengan kota. Memperhatikan kenyataan ini, pemerintah mengalihkan pendekatan terhadap strategi pembangunan yang mengarah kepada kebijakan desentralisasi [2]

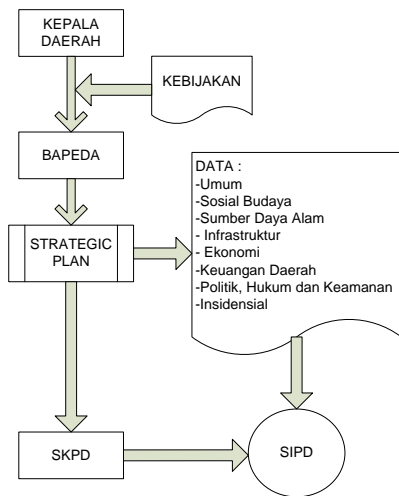
7. Studi Pendahuluan

Kebijakan pemerintah lewat keluarnya peraturan pemerintah No 8 tahun 2014 mengenai keharusan setiap daerah mengimpelementasikan Sistem Informasi Pembangunan Daerah bertujuan untuk menampilkan berbagai informasi kondisi dari suatu daerah. Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) adalah suatu sistem yang bertujuan mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah[3]. Sumber informasi yang diolah diperoleh dari pengolahan data berupa [3]:

- a) Data Umum
- b) Sosial Budaya
- c) Infrastruktur
- d) Ekonomi
- e) Keuangan Daerah
- f) Politik, Hukum, dan Keamanan
- g) Data Insidensial

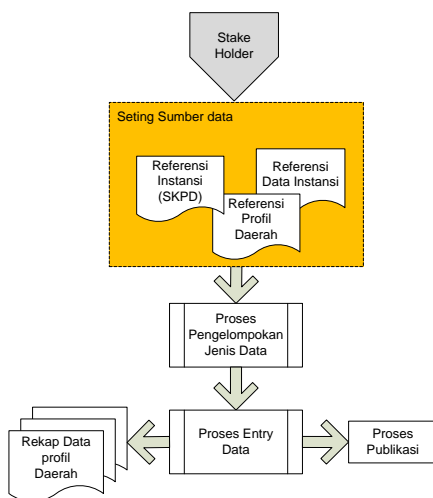
Data tersebut disediakan oleh stake holder yang bersumber dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setiap data yang disiapkan untuk dimasukkan ke dalam SIPD merupakan hasil dari program, kerja yang sebelumnya dibuat dan direncanakan oleh Badan Pembangunan Perencana Daerah (BAPEDA). Unit organisasi ini adalah satuan unit kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah propinsi maupun kabupaten atau kota.

Secara umum bisnis proses penyediaan data pendukung SIPD adalah sebagai berikut :



Gambar 1 Sistem SIPD

Sistem Informasi Pembangunan Daerah secara struktur melibatkan empat entitas yaitu: BAPEDA sebagai unsur pembuat perencanaan pembangunan daerah, SKPD sebagai unsur pembantu kepala daerah dalam mendeskripsikan satuan kerja daerah. Stake holder pemilik data dari tiap unit instansi. Tugas dan fungsi SKPD adalah sebagai fasilitator setiap unit untuk mengumpulkan dan memasukan data ke dalam sistem. SKPD juga memiliki tugas pokok sebagai penanggung jawab terhadap jalannya SIPD. Proses updating dan publikasi informasi akhir dilakukan oleh unit ini. Secara ilustrasi proses bisnis Sistem Informasi Pembangunan Daerah dapat dilihat dalam gambar berikut:



Gambar 2 Proses bisnis Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Hasil akhir bentuk publikasi yang ditampilkan di dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah adalah terbagi menjadi empat paket informasi yang terdiri dari [3]:

- a) Informasi Pembangunan, yang merupakan menu untuk melihat 249 hasil analisa dari 54 Permendagri tahun 2015 yang terbagi ke dalam aspek, fokus, bidang dan analisa yang ditampilkan secara nasional.
- b) Data Pembangunan, merupakan menu untuk menampilkan seluruh elemen data berdasarkan kelompok dan jenis data. Informasi ditampilkan dalam bentuk tabular per kabupaten/kota dan dilengkapi dengan trend grafik dari tahun ke tahun.
- c) Kegiatan strategis yang menampilkan informasi dari program-program strategis direktorat yang ada dilingkungan Direktorat Jendral Bina Pembangunan Daerah.
- d) Analisa Elemen yang menampilkan informasi secara nasional pada level propinsi atau kabupaten/kota

7.1. Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Kinerja (*performance*) adalah gambaran tingkat pelaksanaan pencapaian suatu kegiatan, program, atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran atau tujuan, visi dan misi yang dituangkan dalam *strategic plan*[4]. Pengukuran kinerja (*performance Measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa. Pengukuran kinerja juga merupakan suatu aktivitas penilaian pencapaian target-target tertentu yang diderivasi dari tujuan strategis organisasi. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik memicu timbulnya gejolak yang berakar pada ketidakpuasan. Tuntutan pelayanan yang semakin tinggi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai bentuk pertanggung jawaban yang diberikan oleh penyelenggara Negara atas kepercayaan yang diamanatkan kepada mereka, khususnya kepada pucuk pimpinan pemerintahan daerah. Kondisi ini mendorong peningkatan kebutuhan adanya suatu alat ukur kinerja penyelenggara Negara yang bertujuan untuk melihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam periode waktu tertentu.

7.2 Elemen Pokok Pengukuran Kinerja

Dari hasil analisa dan berbagai definisi, dapat disimpulkan elemen pokok suatu pengukuran kinerja yaitu:

- a) *Menetapkan tujuan, sasaran dan strategi organisasi*, adalah pernyataan secara umum tentang apa yang ingin dicapai organisasi. Sasaran merupakan tujuan organisasi yang sudah dinyatakan secara eksplisit.

- b) *Merumuskan indikator dan ukuran kinerja*, adalah indikator kinerja yang mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung, yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja. Indikator kinerja dapat berupa: faktor-faktor keberhasilan utama (*Critical Success Faktor*) dan indikator Kinerja Kunci (*Key Performance Indicator*)
- c) *Mengukur tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi*, yaitu membandingkan hasil aktual dengan indikator. Pengukuran ini bisa menghasilkan penyimpangan positif, penyimpangan negatif atau penyimpangan nol. Penyimpangan positif berarti pelaksanaan kegiatan menunjukkan keberhasilan, sedangkan penyimpangan negatif menunjukkan pelaksanaan kegiatan belum berhasil.
- d) *Evaluasi kinerja (feedback) penilaian kemajuan organisasi*, adalah memberikan gambaran kepada penerima informasi mengenai nilai kinerja yang berhasil dicapai organisasi.

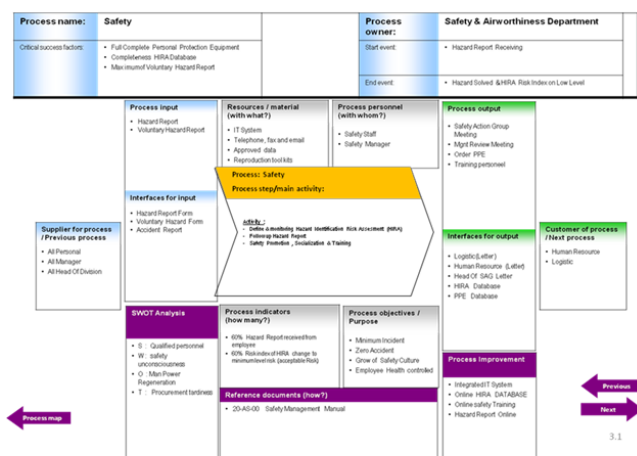
Pemilihan kepala daerah secara langsung memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan program kerja yang di usung pada saat kampanye. Program kerja tersebut akan dilakukan *breakdown task* program utama ketika seorang calon bupati terpilih menjadi kepala daerah. Semua strategi dan kebijakan kepala daerah terpilih dibuat *planning* program yang dirumuskan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah BAPEDA. BAPEDA akan membuat tujuan, sasaran dan strategi pembangunan sesuai dengan kebijakan pemerintahan yang baru.

7.3 Turtle Diagram

Diagram kura-kura (*Turtle Diagram*) adalah sebuah perangkat bantu untuk mendefinisikan setiap tahapan bisnis proses dalam sebuah organisasi yang didalamnya terdiri dari berbagai parameter masukan pendukung untuk mengaktifkan proses bisnis tersebut agar berjalan sesuai dengan rencana. *Turtle Diagram* adalah perangkat yang berfungsi untuk mendeskripsikan, memahami, dan menganalisa proses secara kontinu[5]. Beberapa parameter yang harus terdefinisi dalam Turtle Diagram adalah sebagai berikut:

- Nama Proses (*process name*) yaitu pemberian nama terhadap suatu proses.
- Process Owner adalah pemilik atau penanggung jawab yang menjalankan proses tersebut.
- Critical Success Factor*: adalah parameter utama kesuksesan
- Pemasuk data atau variable untuk proses tersebut
- Proses input, yaitu: data atau informasi yang diperlukan pada saat proses dieksekusi
- Interface for Input* adalah perangkat bantu yang digunakan untuk menjalankan proses ini.

- Recource* yaitu Material yang dibutuhkan untuk mengeksekusi proses tersebut
 - Proses Step: tahapan yang dilakukan setiap kali menjalankan proses.
 - Analisa SWOT: mencantumkan hambatan, kekuatan, kelemahan dan peluang apa saja yang ada ketika proses dijalankan.
 - Proses Indikator: mendefinisikan *Key Performance Indicator*
 - Proses Objective, Menentukan sasaran jika proses ini dikerjakan.
 - Customer of Process: adalah kepada siapa informasi dilanjutkan ketika proses selesai dieksekusi
- Berikut salah satu contoh bentuk *Turtle diagram*:

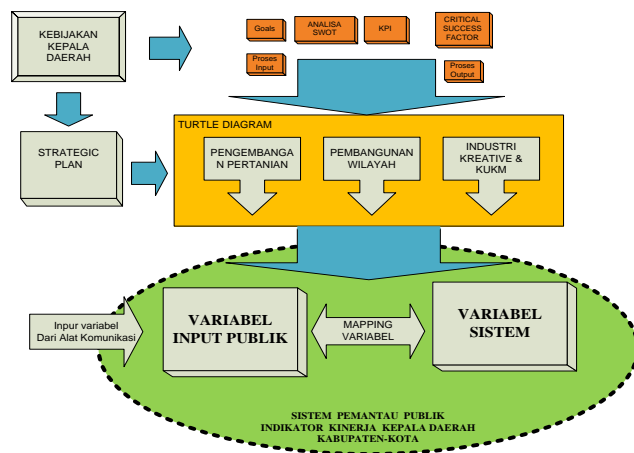


Gambar 3 Contoh Pendefinisian KPI dengan bantuan Turtle Diagram

8. Metoda Pendefinisian Program Kerja menjadi Parameter KPI

Ketika kebijakan kepala daerah sudah terdefinisi, langkah selanjutnya adalah menganalisa proses apa saja yang terkait dengan langkah kebijakan kepala daerah. Jika proses sudah teridentifikasi langkah selanjutnya adalah membuat sebuah *strategic plan* untuk masing-masing proses dimana pada tahap pembuatan *strategic plan* ini harus di definisikan: Goal atau tujuan dari proses, *critical success factor*, analisa SWOT, *Key Performance Indicator*, Proses Input dan output. Masing-masing dari parameter tersebut dimasukan ke dalam perangkat bantu *turtlediagram*. Setelah langkah pembuatan *Turtle Diagram* telah selesai maka tahap selanjutnya adalah melakukan *break down* terhadap variable tadi menjadi object-object beserta *inherit* nya untuk dijadikan data masukan ke dalam sistem. Langkah terakhir adalah menciptakan parameter input publik berdasarkan parameter yang terdefinisi sebelumnya. Parameter publik inilah yang nantinya akan dijadikan sebagai acuan penilaian kinerja kepala daerah

berdasarkan *mapping* data dengan KPI yang sudah terdefinisi sebelumnya. Berikut gambaran lengkap mengenai pendefinisian KPI di dalam Sistem.



Gambar 4 Pendefinisian KPI di dalam sistem

REFERENSI

- [1] Ginanjar Kartasasmita. 1996. Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. CIDES. Jakarta
- [2] Arief, Budiman, 1995. Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- [3] Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2014
- [4] Ermaya Suradinata, 1998, Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Bandung:
- [5] *The Turtle Diagram-Will it meet the process approach requirements proposed in ISO DIS 9001:2015* © ISO 2014